

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 71-82
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10071781)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10071781>

Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Maryam I. Ngguti^{1*}, Ismet Sulila², Romy Tantu³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: maryamngguti03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan & (2) faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi. Terdapat tantangan dan upaya perbaikan yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran, koordinasi, pelatihan, dan responsivitas adalah elemen-elemen penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga tetap menjadi bagian penting dari proses ini guna mencapai hasil yang lebih baik. (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti dapat dioptimalkan oleh faktor komunikasi dan sumber daya, sementara sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih harus dimaksimalkan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat menjadi faktor penting. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BPNT. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendukung implementasi yang berhasil. Penghormatan terhadap budaya dan nilai lokal serta pelatihan etika pelayanan publik dan nilai-nilai program merupakan upaya untuk memperkuat sikap positif pelaksana. Struktur birokrasi yang mendukung, dengan koordinasi antara berbagai lembaga dan prosedur operasi standar yang jelas, telah menciptakan dasar yang kuat. Namun, perlu perbaikan dalam hal fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, dan percepatan proses administrasi.

Kata Kunci: *BPNT, Kemiskinan, Implementasi Kebijakan*

Article Info

Received date: 15 October 2023

Revised date: 26 October. 2023

Accepted date: 02 November 2023

PENDAHULUAN

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,14% poin terhadap maret 2020 dan meningkat 0,97% poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 1,13 juta orang terhadap September 2019

Sedangkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo pada maret 2020 sebesar 185,02 ribu orang (15,22%) meningkat 310 ribu orang. Dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar

184,71 ribu orang (15,31%). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 74.69 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 68.31 ribu jiwa. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 66.72 ribu jiwa. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara", serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia"

Salah satu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia merancang salah satu program yaitu beras miskin (Raskin). Raskin merupakan program dari pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Alur penyaluran RASKIN berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini Kepada Kadivreg/Kasubdivreg/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang beras untuk masing-masing kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker RASKIN. Satker RASKIN mengambil beras digudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi. Di titik distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (Penerima Manfaat) RASKIN dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi RASKIN yaitu Kelompok Kerja (Pokja), atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di titik distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS-PM RASKIN kepada Pelaksana Distribusi.

Pada tahun 2015 Raskin diganti nama menjadi rastra (Beras Sejahtera), Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakan sebutan kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Alur penyaluran Rastra adalah (a). Beras Sejahtera di distribusikan ke titik distribusi (Kecamatan) oleh pihak Bulog. (b). Berita acara serah terima (BAST) Penyerahan Rastra per alokasi antara Satker Bulog Sundivreg dengan petugas Rastra Kecamatan di titik distribusi ditandatangani oleh pihak Bulog dan Ketua Tim Rastra Kecamatan yang diketahui oleh Camat. (c). Berita acara serah terima (BAST) penyerahan Rastra per alokasi antara Satker Bulog Sundivreg dengan Penyalur Rastra ke titik bagi ditandatangani oleh pihak bulog dan pihak penyalur Rastra Kecamatan. (d). Penyalur Rastra Kecamatan mendistribusikan beras sejahtera (Rastra) ke titik bagi yang sudah disepakati oleh tim Rastra kecamatan dan KPM setempat (Contoh kantor desa). (e) kepala desa mendistribusikan Beras Sejahtera (Rastra) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam database Dinas Sosial.

Program Rastra kini berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 penyaluran rastra diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. perubahan itu bertujuan menekan potensi penyalahgunaan bantuan sosial dari Kemensos agar upaya pemerintah mensejahterakan rakyat miskin lebih efektif. Dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial dengan prinsip 6T ialah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.

Bantuan Pangan Non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pusat atau APBN yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Yang bertujuan menekan potensi penyalahgunaan bantuan sosial dari Kemensos agar upaya pemerintah mensejahterakan rakyat miskin lebih efektif. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein seperti telur.

Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dari situ, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), kantor kelurahan dan kantor walikota/kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk mengambil bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-Warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran. pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional. Warung, toko kelontong, atau usaha eceran lainnya.

Kebijakan BPNT di Kabupaten Gorontalo sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Khususnya di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango. Penduduk Desa Sidomukti berjumlah 2.145 jiwa diantaranya laki-laki berjumlah 1.108 jiwa dan perempuan 2.037 jiwa. Salah satu syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai nama harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos RI. Dalam Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai jumlah keluarga Penerima Program BPNT pada tahun 2020 sebanyak 169 penerima yang terdapat di 5 dusun yang ada di Desa Sidomukti dapat dilihat pada tabel 1 yaitu:

Tabel 1: Jumlah keluarga Penerima BPNT di Desa Sidomukti Tahun 2020

No	Dusun	Keluarga Miskin	Keluarga Penerima BPNT
1	Gandaria	83	37
2	Mongolito	19	12
3	Motobuloo	44	29
4	Pasalangi	83	46
5	Banggai	84	45
	Jumlah	313	169

Sumber: Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango

Di Kabupaten Gorontalo Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada KPM setiap bulan sebesar Rp. 200.000/ bulan yang ditransfer melalui Kartu Kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera dan hanya bisa untuk membeli pangan seperti beras, telur, sayuran, daging (ayam), buah-buahan, minyak goreng dan gula pasir. sesuai keinginan pada pedagang pangan e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) yang bekerja sama dengan bank penyalur. Berdasarkan hasil observasi sementara terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyaluran Program BPNT tersebut, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai bagi keluarga kurang

mampu belum tepat waktu dalam penyaluran bantuan. Dimana sering terjadi keterlambatan, masyarakat sering menerima 2 sampai 3 bulan sekali yang seharusnya menerima sebulan sekali. Kemudian ketidaktepatan sasaran, dimana keluarga yang mampu dari segi financial justru mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Dan juga tidak tepat kualitas dimana bahan pangan yang terdapat di e-warong terkadang sudah tidak layak dikonsumsi lagi seperti telur yang sudah busuk, beras yang sudah bercampur ulat dan kutu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mengamati dan menangkap secara faktual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian. Data primer yang akan dilakukan dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai Implementasi Kebijakan BPNT dan Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Sedangkan data sekunder Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen petunjuk pelaksanaan bantuan pangan non tunai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Wawancara, Menurut Esterberg dalam (Sugiyono 2019), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian

kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keuangan. Sasaran dari Program BPNT selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah. Bantuan pangan non tunai BPNT ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Berikut ini merupakan hasil penelitian Implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo:

1. Aspek Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam lingkup administrasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo melibatkan berbagai aspek organisasi yang melibatkan pemerintah desa, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Bank Partner, dan BUMDes (e-warung) sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Proses implementasi dimulai dari pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial, kemudian data KPM diisi oleh pemerintah desa dan diproses oleh kantor desa Sidomukti. Setelah verifikasi data selesai, penerima BPNT akan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan.

2. Aspek Interpretasi

Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentukan kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Aspek interpretasi yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Interpretasi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo menunjukkan beragam pemahaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, pemilik e-Warung, dan pendamping BPNT. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan BPNT bervariasi, dan terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah dan

masyarakat tentang tujuan dan manfaat program ini. Pemilik e-Warung memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan kartu BPNT untuk membeli bahan pangan non tunai. Mereka berusaha menjelaskan manfaat program ini kepada masyarakat dan berperan sebagai agen mandiri yang membantu memahami program tersebut. Tokoh masyarakat atau tokoh adat juga dapat membantu dalam menjelaskan dan memfasilitasi interpretasi kebijakan BPNT kepada masyarakat, karena mereka dipercaya sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

3. Aspek Aplikasi atau Penerapan

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa, penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun serta khusus diarahkan oleh kondisi yang actual

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pada implementasi BPNT di Desa Sidomukti, proses pendaftaran dan seleksi penerima bantuan melibatkan pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. E-Warung sebagai agen mandiri berperan dalam proses distribusi, yang dilakukan dengan menggunakan kartu BPNT. Kendala teknis, seperti masalah jaringan atau perangkat elektronik, bisa muncul selama proses distribusi. Untuk meningkatkan pemahaman penerima bantuan, program pelatihan dan panduan diberikan di e-warung.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan

Berikut faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo:

1. Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan di tranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti. Media sosial dan pertemuan komunitas digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat penerima manfaat, sementara strategi komunikasi yang baik membantu dalam mengatasi kesulitan pemahaman. Peran perantara seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan lebih baik kepada kelompok sasaran. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi resistensi dan ketidaktahuan membantu memastikan bahwa program BPNT diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun ada upaya dalam menggunakan media sosial, terdapat hambatan dalam mentransmisikan tujuan dan sasaran BPNT kepada kelompok sasaran. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang kompleks, tingkat literasi rendah di beberapa kelompok, dan kebingungan terkait teknologi kartu elektronik. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Untuk mengurangi distorsi dalam implementasi BPNT, digunakan beberapa strategi komunikasi. Ini mencakup penyederhanaan pesan, penggunaan contoh nyata, dan penggunaan tokoh masyarakat sebagai juru bicara kebijakan. Penyederhanaan pesan membantu dalam menjelaskan tujuan program secara lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan contoh nyata juga membantu masyarakat dalam memahami cara program ini

2. Faktor Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya sfinansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Sumber daya baik finansial maupun manusia, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti. Meskipun ada beberapa kendala yang diidentifikasi, upaya telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sumber daya dan memastikan infrastruktur berfungsi dengan baik. Evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam pengawasan dapat membantu meningkatkan efektivitas program ini. Implementor kebijakan BPNT di Desa Sidomukti memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan program ini. Meskipun demikian, perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk menjalankan program secara efektif.

3. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Sikap positif dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan terkait dengan kompetensi dan motivasi para pelaksana kebijakan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat penerima manfaat. Masyarakat merasakan rendahnya tingkat kesadaran dan motivasi para pelaksana kebijakan, yang menyebabkan pelayanan yang kurang optimal. Masyarakat juga mencatat kurangnya program pelatihan atau pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi para pelaksana kebijakan BPNT dalam hal pelayanan dan penanganan administrasi. Terlebih lagi, masyarakat merasakan kurangnya sikap pelayanan dan kepedulian dari para pelaksana kebijakan, yang bisa membuat mereka merasa diabaikan.

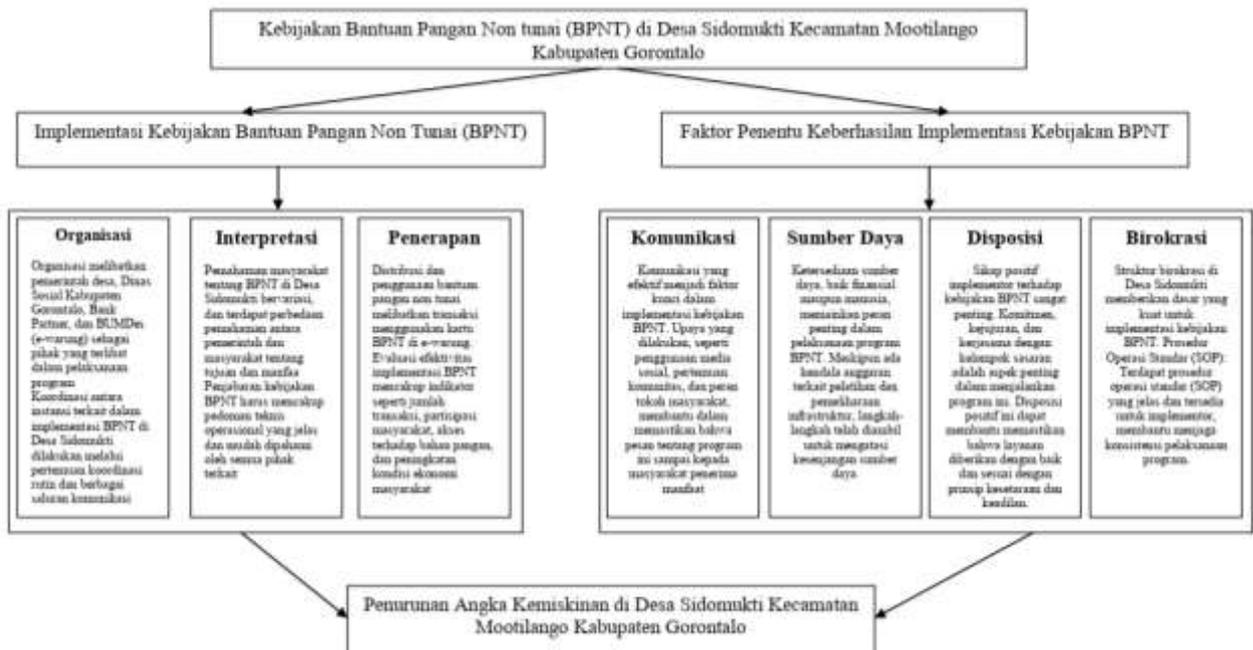
4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red0taoe* , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Struktur birokrasi di Desa Sidomukti memberikan dasar yang kuat untuk implementasi kebijakan BPNT. Namun, ada potensi untuk meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi antar lembaga terkait, serta mempercepat proses administrasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan lebih lanjut. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap menjadi bagian penting dari upaya menuju keberhasilan implementasi kebijakan BPNT. Masyarakat melihat kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial, dalam implementasi kebijakan BPNT. Tidak ada upaya yang terlihat untuk mempercepat proses administrasi atau birokrasi

yang terkait dengan kebijakan BPNT, yang mengakibatkan pelayanan yang kurang efisien dan responsif.

Hasil mengenai implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dan faktor-faktor penentu keberhasilan kebijakan dapat digambarkan dalam diagram konteks berikut:



Gambar 1. Diagram Konteks Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi. Terdapat tantangan dan upaya perbaikan yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran, koordinasi, pelatihan, dan responsivitas adalah elemen-elemen penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga tetap menjadi bagian penting dari proses ini guna mencapai hasil yang lebih baik.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti dapat dioptimalkan oleh faktor komunikasi dan sumber daya, sementara sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih harus dimaksimalkan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat menjadi faktor penting. Pendekatan berbasis media sosial, pertemuan komunitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan telah digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai BPNT. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BPNT. Pelatihan, pendekatan berbasis kebutuhan, dan upaya untuk memperoleh sumber daya tambahan telah digunakan untuk mengatasi kendala dalam hal sumber daya. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendukung implementasi yang berhasil. Penghormatan terhadap budaya dan nilai lokal serta pelatihan etika pelayanan publik dan nilai-nilai program merupakan upaya untuk memperkuat sikap positif pelaksana. Struktur birokrasi yang

mendukung, dengan koordinasi antara berbagai lembaga dan prosedur operasi standar yang jelas, telah menciptakan dasar yang kuat. Namun, perlu perbaikan dalam hal fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, dan percepatan proses administrasi.

Kebijakan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) dapat mereduksi atau menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, dimana dengan adanya kebijakan ini kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo cenderung mengalami penurunan. Data mengenai kemiskinan dapat disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 2. Data Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo tahun 2020-2022

No	Dusun	2020	2021	2022
1.	Gandaria	98 Kepala Keluarga	92 Kepala Keluarga	83 Kepala Keluarga
2.	Mongolito	55 Kepala Keluarga	43 Kepala Keluarga	19 Kepala Keluarga
3.	Motobulo	65 Kepala Keluarga	56 Kepala Keluarga	44 Kepala Keluarga
4.	Pasalangi	89 Kepala Keluarga	72 Kepala Keluarga	83 Kepala Keluarga
5.	Banggai	83 Kepala Keluarga	89 Kepala Keluarga	84 Kepala Keluarga
Jumlah		390 Kepala Keluarga	352 Kepala Keluarga	313 Kepala Keluarga

Sumber: Pemerintah Desa Sidomukti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Selama periode tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan signifikan jumlah penduduk miskin di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Penurunan ini tampaknya diakibatkan oleh implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 390 kepala keluarga di Desa Sidomukti masuk dalam kategori penduduk miskin. Namun, dengan berjalannya waktu, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021, di mana jumlah kepala keluarga yang hidup dalam kemiskinan menurun menjadi 352. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2022, ketika hanya terdapat 313 kepala keluarga yang masih tergolong sebagai penduduk miskin.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi BPNT di Desa Sidomukti telah memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di komunitas tersebut. Dengan menyediakan akses pangan yang lebih baik dan menyeluruh, kebijakan ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak dalam menangani isu sosial yang ada di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Pemerintah desa senantiasa mendukung program ini agar terus memberikan dampak positif dalam mereduksi kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah suatu program bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin atau rentan secara ekonomi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga tersebut memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang berkualitas, dengan cara memberikan bantuan berupa kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan

tertentu, seperti beras, gula, minyak, telur, dan daging di toko-toko atau pedagang yang telah bekerjasama dengan program BPNT. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan secara ekonomi dengan cara memastikan akses masyarakat miskin terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.

Hasil penelitian fokus pertama ditemukan bahwa implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi. Terdapat tantangan dan upaya perbaikan yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran, koordinasi, pelatihan, dan responsivitas adalah elemen-elemen penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga tetap menjadi bagian penting dari proses ini guna mencapai hasil yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Gultom, dkk (2020) bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. BPNT memastikan bahwa keluarga miskin atau rentan secara ekonomi memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan yang berkualitas. Dengan kartu elektronik yang masyarakat terima, mereka dapat membeli produk pangan esensial seperti beras, gula, minyak, telur, dan daging. Ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Penurunan Tingkat Kelaparan: Dengan meningkatkan akses ke pangan, BPNT membantu mengurangi tingkat kelaparan di kalangan keluarga miskin. Kelaparan adalah salah satu dampak utama dari kemiskinan, dan dengan memberikan bantuan pangan, program ini membantu mengatasi masalah ini. Keberhasilan BPNT dalam mengurangi kemiskinan sangat tergantung pada implementasi yang baik, pemantauan yang efektif, dan upaya untuk memastikan bahwa bantuan pangan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Program ini harus berjalan dengan baik dan efisien untuk mencapai dampak yang diharapkan dalam mengurangi kemiskinan.

Program BPNT dapat membantu meningkatkan status gizi keluarga miskin. Dengan akses yang lebih baik terhadap berbagai jenis makanan, keluarga miskin memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang. Program ini juga membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk tujuan yang benar-benar diperlukan, yaitu untuk membeli makanan. Ini mengurangi risiko pemborosan atau penyalahgunaan dana bantuan. BPNT memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Aspat & Syahrudin (2019) mengatakan bahwa BPNT dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke pangan. Dengan memastikan akses ke pangan yang lebih baik, BPNT dapat mengurangi tekanan keuangan yang biasanya dialami oleh keluarga miskin. Ini dapat membantu mereka untuk lebih baik dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Secara keseluruhan, program BPNT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan jaminan akses ke pangan yang cukup dan berkualitas.

Hasil penelitian fokus kedua ditemukan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti dapat dioptimalkan oleh faktor komunikasi dan sumber daya, sementara sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih harus dimaksimalkan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat menjadi faktor penting. Pendekatan berbasis media sosial, pertemuan komunitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan telah digunakan untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai BPNT. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BPNT. Pelatihan, pendekatan berbasis kebutuhan, dan upaya untuk memperoleh sumber daya tambahan telah digunakan untuk mengatasi kendala dalam hal sumber daya. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendukung implementasi yang berhasil. Penghormatan terhadap budaya dan nilai lokal serta pelatihan etika pelayanan publik dan nilai-nilai program merupakan upaya untuk memperkuat sikap positif pelaksana. Struktur birokrasi yang mendukung, dengan koordinasi antara berbagai lembaga dan prosedur operasi standar yang jelas, telah menciptakan dasar yang kuat. Namun, perlu perbaikan dalam hal fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, dan percepatan proses administrasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Agustina & Megawati (2022) bahwa 1) Input, dapat dikatakan telah optimal dimana latar belakang terciptanya kebijakan sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat, kemudian sumber daya manusia, dana, serta infrastruktur pendukung juga sangat menunjang keberhasilan penyaluran bantuan. 2) Proses, dapat dikatakan belum berjalan optimal dimana KPM belum mengetahui adanya aplikasi cek bansos guna menunjang penentuan KPM yang tepat sasaran, kemudian dalam mekanisme penyaluran bantuan tidak mengikuti aturan yang berlaku. 3) Outputs, dapat dikatakan telah optimal dimana hasil dari kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan pangan mereka, sehingga berimbas terhadap tingkat kemiskinan di. 4) Outcomes, dapat dikatakan telah optimal karena dampak positif yang diberikan dari program BPNT ini sangat luas. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada konteks, jenis kebijakan, dan tujuan yang ingin dicapai. Wiwit, dkk (2020) mengatakan bahwa program BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin, sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan implementasi kebijakan seperti BPNT seringkali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor dan upaya yang terintegrasi antara komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara faktor-faktor ini merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan melalui program bantuan pangan non tunai.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi. Terdapat tantangan dan upaya perbaikan yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran, koordinasi, pelatihan, dan responsivitas adalah elemen-elemen penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga tetap menjadi bagian penting dari proses ini guna mencapai hasil yang lebih baik. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti dapat dioptimalkan oleh faktor komunikasi dan sumber daya, sementara sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih harus dimaksimalkan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat menjadi faktor penting.

Pendekatan berbasis media sosial, pertemuan komunitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan telah digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai BPNT. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BPNT. Pelatihan, pendekatan berbasis kebutuhan, dan upaya untuk memperoleh sumber daya tambahan telah digunakan untuk mengatasi kendala dalam hal sumber daya. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendukung implementasi yang berhasil. Penghormatan terhadap budaya dan nilai lokal serta pelatihan

etika pelayanan publik dan nilai-nilai program merupakan upaya untuk memperkuat sikap positif pelaksana. Struktur birokrasi yang mendukung, dengan koordinasi antara berbagai lembaga dan prosedur operasi standar yang jelas, telah menciptakan dasar yang kuat. Namun, perlu perbaikan dalam hal fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, dan percepatan proses administrasi.

Referensi

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 175-190.
- Aspar, & Syakhrudin. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 305–325.
- Auldrin, P., Novie, P., & Femmy, T. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan_Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, volume 3.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4).
- Nursanjaya. (2021). Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa. *NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 04(01), 126–141. <https://ojs.unimal.ac.id>
- Pathony, T. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warung) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. 1(2), 19.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Sutopo (ed.); Cetakan Pe). Alfabeta.
- Surya Kharismawati, I., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Publika*, 6(8).
- Wiwit, W., & Kamil, M. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-12.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>